

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengguna media sosial di beberapa negara Muslim bergabung dengan seruan untuk memboikot produk Prancis. Seruan yang semula hanya ramai di media sosial, berujung pada aksi protes setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara resmi memberikan dukungan (Aljazeera, 2020). Protes itu dilatarbelakangi oleh pernyataan presiden Prancis Emmanuel Macron, yang mendukung kebebasan majalah satire Prancis Charlie Hebdo untuk “mengejek” Nabi Muhammad pasca-pembunuhan Samuel Paty (CBS News, 2020). Samuel Paty yang merupakan guru sejarah di Prancis, dibunuh pada 16 Oktober 2020 oleh Abdullah Anzorov, imigran berusia 18 tahun asal Chechnya yang tinggal di kota Evreux, Normandia (Aljazeera, 2020). Ia dibunuh dengan cara dipenggal setelah menunjukkan karikatur Nabi Muhammad, yang diterbitkan oleh Charlie Hebdo, kepada murid-muridnya sebagai bagian dari pelajaran tentang kebebasan berbicara (NPR, 2020).

Tidak hanya membunuh Samuel Paty, sebelumnya, karikatur tersebut telah menginspirasi banyak serangan teroris, termasuk serangan tahun 2011 dan 2015. Serangan 2015, yang terjadi pada 7 Januari, telah menewaskan 12 orang, termasuk beberapa kartunis terkemuka, dan 11 orang lainnya luka-luka (The Independent, 2015). Pelaku penembakan, yang dikenal dengan Said dan Cherif bersaudara, merupakan warga negara Prancis keturunan Aljazair yang tergabung dalam

jaringan kelompok teroris al-Qaeda. Dengan membawa senapan, dua bersaudara itu menerobos masuk ke kantor Charlie Hebdo di Paris. Selama aksinya, mereka berulang kali meneriakkan “Allahuakbar” dan “kami telah membalas dendam Nabi Muhammad” (Polonska-Kimungiyi dan Gillespie, 2016). Francois Hollande, presiden Prancis sebelum Macron, menggambarkan serangan itu sebagai serangan paling brutal (Independent, 2015).

Setelah aksi teror yang menewaskan 12 kartunis pada 2015 itu, Charlie Hebdo menuai empati dunia. Tagar #JesuisCharlie sempat menjadi trending dunia di Twitter dan dengan slogan yang sama, di Paris, terjadi unjuk rasa besar-besaran yang dimaksudkan untuk menentang pelaku teroris (The Sidney Morning Herald, 2015) Slogan “Je suis Charlie” atau “I am Charlie” diartikan sebagai bentuk dukungan kebebasan berbicara dan perlawanan terhadap ancaman terorisme. Beberapa wartawan juga menganggap slogan itu sebagai seruan untuk kebebasan pers (The Telegraph, 2015). Sebagai balasan dan ekspresi ketidaksetujuan, tagar #JeNeSuisPasCharlie muncul dan digunakan oleh mereka yang menganggap Charlie Hebdo sebagai majalah rasis. Dalam sebuah artikel berjudul "I am not Charlie Hebdo" yang diterbitkan oleh The New York Times, jurnalis Amerika David Brooks menganggap Charlie Hebdo sebagai majalah kekanak-kanakkan yang mengusung humor kebencian (NYT, 2015) Selain itu, beberapa media bahkan memilih untuk tidak menerbitkan kartun Charlie Hebdo sebagai bagian dari pemberitaan (Now, 2015).

Charlie Hebdo memang tidak asing dengan kontroversi. Majalah satire Prancis yang dikenal dengan slogan “bete et mechante” ini telah banyak menyinggung

beragam spektrum politik dan telah lama dituduh rasis dan anti-Islam (Huffpost, 2015). Dalam tradisi radikalisme sayap kiri, Charlie Hebdo tidak melulu “mengejek” agama Islam. Majalah yang dikenal sekuler dan anti-agama ini juga banyak menyinggung partai sayap kanan Prancis, agama Katolik dan Yahudi, politik, serta budaya (BBC, 2015). Dalam beberapa sampul majalahnya, Charlie Hebdo telah beberapa kali menyinggung ikon-ikon Kristen dan pemimpin gereja, (Quartz, 2017). Salah satunya adalah karikatur Paus Benediktus XVI yang memegang kondom di bawah judul “Le Pope Va Trop Loin” atau “Paus Bertindak Terlalu Jauh” (Business Insider, 2015). Charlie Hebdo lebih banyak terlibat masalah hukum dengan orang Kristen daripada dengan Muslim (Quartz, 2015). Sekitar waktu kontroversi kartun Nabi Muhammad pada tahun 2011 terjadi, editor majalah Charlie Hebdo mencatat bahwa publikasi kartun tersebut telah dituntut oleh organisasi Katolik sebanyak 13 kali tetapi hanya sekali oleh organisasi Muslim (Quartz, 2015). Selain itu, terkait budaya, Charlie Hebdo juga menyinggung kematian King of Pop Michael Jackson pada tahun 2009. Tidak tanggung-tanggung, di sampul majalahnya tertulis “Michael Jackson Enfin Blanc,” artinya “Michael Jackson akhirnya putih” (Business Insider, 2015).

Sebagai bentuk perlawanan terhadap operasi ekstremis Islam, Charlie Hebdo kembali menerbitkan kartun-kartun kontroversial Nabi Muhammad pada 2 September 2020 (France24, 2020). Di antara 13 kartun itu, salah satu yang menarik perhatian adalah kartun Nabi Muhammad yang mengenakan sorban berbentuk bom dengan sekering yang menyala:



(Sumber: Liberation.fr, 2020).

Sebagai presiden, Macron mengatakan tidak berhak memberikan penilaian atas keputusan Charlie Hebdo untuk mencetak ulang kartun-kartun tersebut. Namun sikapnya itu menimbulkan petaka. Pada 25 September 2020, terjadi serangan “teroris” di depan bekas kantor Charlie Hebdo di Paris (Aljazeera, 2020). Meskipun belum ada bukti, otoritas Prancis menyebut serangan itu sebagai terorisme Islam (NYT, 2020). Macron menanggapi serangan itu dengan menyatakan Islam "dalam krisis" dan berjanji untuk menghapus "separatisme Islam" di Prancis (Aljazeera, 2020). Sedikit sudah disinggung di atas, petaka itu berlanjut, hingga pembunuhan Samuel Paty pada 16 Oktober 2020. Usai tragedi itu, Macron memperkuat pertahanan tradisi sekuler Prancis dan berjanji untuk menindak radikalisme Islam, khususnya dengan menutup masjid yang dicurigai mengobarkan ide-ide ekstremis (Daily Sabah, 2020).

Negara-negara Muslim mengutuk pernyataan Macron soal Islam “dalam krisis” tersebut dan menyerukan pemboikotan produk-produk Prancis. Turki "memimpin" tuntutan itu, dengan Erdogan mengatakan Macron membutuhkan "pemeriksaan kesehatan mental" dan menuduhnya menjalankan agenda anti-Islam (DW, 2020). Di Turki, seruan Erdogan untuk memboikot produk Prancis menerima banyak dukungan, meskipun tidak sedikit juga yang menentang (Euro News, 2020). Bagi mereka yang mendukung, penerbitan kartun-kartun itu tidak bisa dikatakan sebagai kebebasan berekspresi, melainkan suatu penganiayaan. Membeli produk Prancis berarti mendukung penganiayaan terhadap Muslim. Karena itu, Renault dan Peugeot serta Carrefour, beberapa dari perusahaan besar Prancis, terkena imbas boikot produk Prancis di Turki (Euro News, 2020). Namun seruan itu dianggap kekanak-kekanakkan bagi pihak yang menentang, memboikot produk Prancis dalam jumlah besar tidak hanya merugikan Prancis, tetapi juga Turki. Berdasarkan lembaga statistik di Turki, Prancis merupakan sumber impor terbesar ke-10 dan pasar ekspor terbesar ketujuh untuk Turki (BBC, 2020).

Seruan Erdogan untuk memboikot produk Prancis juga mendapat dukungan dari banyak negara Muslim. Beberapa toko seperti di Yordania Kuwait dan Qatar telah mengeluarkan lusinan produk Prancis dari rak mereka (ABC News, 2002) , sementara Universitas Qatar telah membatalkan pekan budaya Perancis. Protes juga datang dari di Irak, Suriah, Libya, Jalur Gaza, dan Bangladesh. Aksi protes dari negara-negara tersebut, diikuti oleh puluhan ribu demonstran yang membakar patung Macron, dan membuat poster-poster merendahkan. Imran Khan, Perdana

Menteri Pakistan, juga mengatakan Macron telah mendorong sentimen anti-Muslim dan dengan sengaja memprovokasi umat Islam. Khan juga telah memanggil duta besar Prancis untuk mengajukan protes. Meski begitu, belum ada negara Muslim yang mengumumkan boikot secara resmi, termasuk Qatar yang mendukung Turki (Euro News, 2020).

Komentar Erdogan soal “pemeriksaan kesehatan mental” itu, membuat Prancis menarik duta besarnya dari Turki (France24, 2020). Bagi Prancis, komentar Erdogan itu tidak dapat diterima, dan kebijakan Erdogan untuk memboikot produk Prancis perlu diubah karena terlalu berbahaya. Usai peristiwa pemenggalan Samuel Paty, Erdogan bahkan tidak mengucapkan bela sungkawa atau pun dukungan. Erdogan justru meminta para pemimpin Eropa agar Macron menghentikan kampanye kebenciannya terhadap Islam (BBC, 2020). Usai mengomentari Macron, Erdogan lanjut berkomentar tentang Eropa. Menurutnya, permusuhan terhadap Islam dan Muslim telah menjadi kebijakan yang didorong dan didukung oleh pemimpin negara. Ia bahkan menuduh para pemimpin Eropa fasis sejati, dan menyamakan perlakuan mereka terhadap Muslim di Eropa dengan perlakuan Nazi terhadap orang Yahudi (Politico, 2020).

Para pemimpin Eropa mendukung Macron dan mengkritik serangan terhadap Prancis, terutama dari Turki (DW, 2020). Jerman menyatakan "solidaritas" dengan Macron setelah komentar Erdogan, dengan juru bicara Steffen Seibert menyebut pernyataan "fitnah" dan "benar-benar tidak dapat diterima," dan menteri luar negeri Heiko Maas menyebut serangan pribadi Erdogan terhadap Macron sebagai "new low" atau serangan baru (BBC, 2020). Perdana Menteri Belanda

Mark Rutte mengatakan Belanda "berdiri teguh" dengan Prancis untuk nilai-nilai kolektif Uni Eropa. Dalam Twiternya ia menambahkan:



Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte juga menyatakan "solidaritas penuh" dengan Macron. Dan dalam Twiternya ia mengatakan: "Penghinaan pribadi tidak membantu agenda positif yang ingin dikejar Uni Eropa dengan Turki" (DW, 2020)



Seruan boikot dan Komentar Erdogan “yang tidak dapat diterima itu” tidak hanya membuat Prancis menarik duta besarnya, tetapi juga mendorong Uni Eropa (UE)

untuk mengambil tindakan terhadap Turki (France24, 2020) Komisi Eropa sebelumnya telah memperingatkan bahwa seruan Erdogan yang “konfrontatif” itu, akan semakin menyulitkan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa (CBS NEWS, 2020). Sejak 1987, Turki telah mengajukan lamaran untuk bergabung dengan UE dan telah memulai negosiasi akses resmi pada tahun 2005 (CSBS News, 2020). Namun, pada pertemuan “mendesak” yang (direncanakan) akan dilakukan pada bulan Desember 2020. Negara-negara anggota UE setuju untuk meninjau perilaku Turki dan mengancam akan menjatuhkan sanksi jika Erdogan tidak menghentikan “konfrontasinya” (France24, 2020). Dalam pertemuan mendesak itu, akan ada banyak diskusi tentang apakah UE akan terus menunggu atau mengambil tindakan lebih jauh terhadap Turki. Sementara itu, juru bicara UE Peter Stano mengharapkan perubahan dalam tindakan dan deklarasi dari pihak Turki (DW, 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Kecaman Erdogan terhadap Macron yang dianggap anti-Islam membuat beberapa pejabat Uni Eropa balik mengecamnya, mengapa Erdogan seperti itu, padahal sikapnya akan semakin menyulitkan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua tujuan: satu, mendemonstrasikan peran yang dimainkan oleh kepribadian Erdogan dalam membentuk kebijakan luar negeri Turki, terutama kebijakan untuk memboikot produk Prancis; dan dua, peneliti berharap dapat berkontribusi dalam perkembangan penelitian tentang pentingnya

pendekatan yang berpusat pada aktor individu dalam analisis kebijakan luar negeri.

1.4 Tinjauan Pustaka

Sejak berdirinya republik modern, orientasi Barat¹ telah mendominasi kebijakan luar negeri Turki. Selama Perang Dingin, hubungan Turki dan Uni Eropa menghangat dan Amerika Serikat menjadi sekutu terpenting Turki. Keduanya sama-sama memiliki kepentingan untuk membendung ekspansi Uni Soviet (Gulnur, 1994). Namun pada tahun 1990an, periode pasca-Perang Dingin, Turki hampir tidak punya strategi arah kebijakan luar negeri yang jelas (Sozen, 2010). Di satu sisi, Turki berupaya bergabung dengan Uni Eropa, di sisi lain, Turki juga berupaya memperkuat hubungan regionalnya dengan Balkan, Timur Tengah, dan Kaukasus (Taspinar, 2008). Pada tahun 2002, AKP mulai memerintah dan membawa seperangkat prinsip dan strategi baru untuk kebijakan luar negeri Turki yang disebut Neo-Ottomanisme (Sözen, 2010). Arah kebijakan ini menimbulkan kontroversi, baik di dalam maupun di luar negeri. Negara-negara Barat khawatir Turki akan menjauh dari Barat dan menuju orientasi yang kurang demokratis, lebih Islami, atau lebih pro-Rusia dan Pro-China (Taylor, 2017).

¹ Barat atau blok Barat merujuk pada kekuatan yang bersekutu dengan Amerika Serikat dan NATO melawan Uni Soviet, yang disebut sebagai blok Timur, dan Pakta Warsawa (Kissinger, 2004). Blok Barat cenderung menyebut dirinya sebagai “dunia bebas,” karena menganut ideologi liberalis yang bersifat bebas atau berpandangan luas.

Kebijakan luar negeri pada pemerintahan AKP menyimpang dari kebijakan luar negeri sebelumnya. Saat pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk, pendiri republik Turki, Turki secara sadar berpaling dari Timur Tengah karena kepercayaan bahwa Timur Tengah adalah tempat yang terbelakang dan terikat tradisi (Sozen, 2010). Lebih lanjut, dengan Atatürk yang ingin menjadi orang Eropa, melakukan kontak dengan Timur Tengah akan menghalangi keinginannya itu. Sejak AKP memerintah, bagaimana pun, Turki telah meningkatkan hubungan dengan dunia Arab dan telah menyadari bahwa Turki tidak dapat meninggalkan sejarah dan geografinya (Taspinar, 2008). Perubahan kebijakan luar negeri Turki di bawah AKP ini tidak terlepas dari peran Recep Tayyip Erdogan. Meskipun terpilih sebagai presiden pada tahun 2014, Erdogan telah menjadi pusat pengambilan keputusan di Turki sejak ia menjabat sebagai perdana menteri (Fernandes & Carvalhais, 2014). Dengan, kecenderungan otoriter dan solidaritas Islam, dia meluncurkan ide "Turki Baru" yang mengkonfigurasi ulang sistem politik dan mengubah presuposisi sejarah, budaya dan politik Turki dan semakin jauh dari Barat dan nilai-nilai demokrasi (Fernandes & Carvalhais, 2014). Pada saat pertama kali terpilih sebagai perdana Menteri, Erdogan telah menegaskan, "demokrasi itu seperti trem. Kita akan keluar ketika kita tiba di stasiun yang kami inginkan (Der Spiegel, 2010).

Erdogan mempunyai pengaruh yang lebih besar dibanding dengan pemimpin pendahulunya. Dia menjelma menjadi sosok yang sangat kuat dan kepribadiannya menjadi kunci pengambilan keputusan kebijakan kontroversial pemerintah AKP (Gorener dan Ucal, 2011). Pandangan khusus Erdogan tentang moralitas dan

penilaian yang tegas tentang perilaku benar dan salah, membuat Turki memutuskan hubungannya dengan Israel yang telah terjalin sejak 1950-an (Görener dan Ucal, 2011). Kecenderungan dikotomis Erdogan yang melihat politik sebagai perjuangan antara benar dan salah, adil dan tidak adil, penjahat dan korban, tidak hanya memperburuk hubungannya dengan Isarel, tetapi juga membuatnya dipertanyakan apakah Turki benar-benar dapat berperan sebagai mediator yang aktif dan netral dalam menhgadapi konflik regional. Selain itu, pemikirannya yang kaku dan preferensinya untuk terlibat dengan orang lain yang berpikiran sama, khususnya penghormatannya pada solidaritas Islam, membuat niatnya untuk menjadikan Turki pemain di kancah global agak tidak meyakinkan (Gorener dan Ucal, 2011).

Banyak analis menilai Erdogan berusaha keras untuk mengembalikan kejayaan masa lalu kerajaan Ottoman. Namun usaha itu dinilai hanya akan mengorbankan kawasan dan mengorbankan agama Islam yang ia gunakan sebagai basis dukungan (WPR, 2020) Erdogan, selain ingin tampil sebagai pemimpin spiritual Sunni di dunia Islam, juga mencoba menemukan keuntungan dalam kampanye boikot Prancis. Ia mengandalkan Ikhwanul Muslimin Kuwait untuk mempermalukan Arab Saudi. Meningkatnya seruan di Kuwait untuk memboikot produk Prancis bukan murni tindakan membela Islam dan Nabi Muhammad, melainkan bagian dari rencana Turki dan Qatar untuk mendorong Kuwait ke pusat gerakan boikot yang bertujuan mempermalukan Arab Saudi (AW, 2020). Arab Saudi sebelumnya telah memboikot produk Turki, sehingga Turki ingin menunjukkan bahwa permusuhan Arab Saudi dan Turki setara dengan

permasalahan Turki dengan Prancis (AW, 2020). Hal ini membuat Arab Saudi sangat waspada terhadap gerakan Turki di wilayah tersebut dan strategi anti-Saudi yang mendasarinya. Saudi juga mulai memandang Turki sebagai musuh yang mengancam kepentingan mereka di Kawasan. Dengan melakukan itu, Turki tidak hanya memburuk citranya di dunia Arab, tetapi juga mengorbankan hubungan Turki yang sudah penuh dengan sesama anggota NATO dan menambah ketidakpopulerannya di antara masyarakat Eropa (AW, 2020).

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Analisis Tingkat Individu (LoA Individu)

Kebijakan luar negeri bersifat *puzzling* dan sulit dipahami secara sepihak karena terdapat banyak faktor yang memengaruhi (Breuning, 2007). Tidak hanya teori Hubungan Internasional, *Level of Analysis* (LoA) juga dapat dijadikan alat untuk melihat atau memahami perilaku negara dalam sistem internasional. Kelebihannya, LoA sama halnya dengan kamera, dengan menggunakan setiap ukuran lensa, seperti LoA individu, sistem, negara, dan organisasi, akan didapat hasil akhir “foto” sesuai keinginan (Neack, 2008). LoA Individu berfokus pada individu sebagai pengambil kebijakan. Variabel tingkat individu, seperti persepsi, kognisi dan motivasi, dapat memperkaya pemahaman tentang perilaku negara (Sozen, 2010). Terdapat tiga asumsi dasar terkait LoA individu: satu, tindakan pemimpin dalam mengambil keputusan didasarkan pada keyakinan yang dipegangnya; dua, individu bertindak dan melihat lingkungannya berdasarkan pada aspek kognitif dan psikologisnya sendiri; tiga, individu cenderung menolak

beradaptasi terhadap perubahan lingkungan karena mereka cenderung berpikiran close-minded atau tertutup (Rosati, 1995). Berbeda dengan lainnya, perspektif realisme mengasumsikan individu sebagai aktor rasional yang mewakili kepentingan nasional negaranya (Neack, 2008). Secara umum, ada dua faktor yang memengaruhi aktor, baik individu atau negara dalam membuat kebijakan luar negeri, yaitu sistem internasional dan situasi domestik suatu negara (Singer, 1961)

1.5.2 Teori Kognitif

LoA Individu mencakup teori kognitif. Teori ini, sudah disebutkan di atas, menjelaskan bagaimana peran psikologis seperti persepsi, mispersepsi, dan sistem kepercayaan pemimpin berpengaruh terhadap perilaku kebijakan luar negeri suatu negara (Newmann, t.t). Dengan kata lain, teori ini menjelaskan kebijakan luar negeri dengan melihat cara individu atau pemimpin melihat dunia (Larson, 1999 dalam Newmann, t.t). Individu atau pemimpin cenderung berpikiran tertutup dan menolak beradaptasi dengan perubahan lingkungan karena keyakinan dan cara mereka dalam mengolah informasi (Rosati, 1995). Asumsi ini berbeda dari asumsi rasional kaum Realis yang menekankan pada keterbukaan pola pikir dan karakter adaptif seorang individu terhadap lingkungannya. Tindakan Individu, dalam pendekatan Kognitif, tidak selamanya sesuai dengan dinamika lingkungannya untuk merespons dan menjaga survival negaranya. Pada faktanya, individu atau pemimpin akan cenderung untuk memilih berpikir jernih berdasar apa yang benar dan seharusnya dilakukan menurutnya (Rosati, 1995).

1.5.3 Teori Pilihan Rasional

Selain melihat dari sisi kognitif, penulis mencoba melihat kepentingan atau keuntungan Turki di balik konfrontasi Erdogan dengan Barat terutama Prancis, dengan pendekatan teori Rasional. Asumsi ini memang bertolak belakang dengan teori sebelumnya, alih-alih berfokus pada kepercayaan pemimpin, teori pilihan rasional berfokus pada individu sebagai aktor rasional yang mewakili kepentingan nasional negaranya (2008). Ada beberapa asumsi model rasional aktor turunan perspektif realis yang menjelaskan pengaruh lingkungan sekitar atau aktor lain terhadap pembuat kebijakan dalam menentukan kebijakan: satu, negara sebagai aktor tunggal memiliki perhitungan yang rinci sebelum membuat dan mengambil keputusan alternatif sehingga diperlukan analisis yang mendalam; dua, setiap individu yang berperan sebagai pemimpin negara tidak dapat menghindar dari security dilemma, di mana suatu negara yang berniat untuk memperkuat keamanan dalam negeri dapat dicurigai intensinya, meskipun hal itu baik (Neack, 2008). Pada prinsipnya, karena individu diasumsikan sebagai negara yang memiliki kepentingan nasional, setiap kebijakan negara yang diambil oleh negara bersifat rasional, dengan mempertimbangkan reaksi dari negara lain dan memperhitungkan cara menjalin kerjasama menguntungkan jangka panjang dengan negara lain. Dengan kata lain, teori pilihan rasional pada prinsipnya digunakan untuk menjawab mengenai keputusan terbaik manakah yang diambil untuk mengejar kepentingan nasional dari pembuat kebijakan dalam merespon dinamika di lingkungan internasional (Walt, 1999).

1.6 Hipotesis

Berdasarkan pemaparan di atas, ada dua asumsi di balik sikap “konfrontatif” Erdogan terhadap pemimpin Prancis dan Eropa: satu, Erdogan mencoba menghentikan upaya Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa, dan melihat dunia Arab, yang dulu dianggap simbol keterbelakangan, kini lebih menjanjikan; dan dua, sikap itu merupakan cara Erdogan untuk tampil sebagai pembela Islam dan pemimpin Sunni di dunia Arab.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Definisi dan Operasionalisasi Konsep

1.7.1.1 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri, yang pasti, berkaitan dengan perilaku suatu negara. Namun, para penstudi mendefinisikannya dengan cara yang berbeda-beda. Hermann misalnya, mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai, “the discrete purposeful action that results from the political level decision of an individual or group of individuals. It is the observable artifact of a political level decision. It is not the decision, but a product of the decision” (Neack, 2008). Dengan ini, tampaknya Hermann mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai perilaku negara. Sementara itu, menurut Joseph Frankel (2008), “foreign policy consists of decisions and actions, which involves to some appreciable extent relations between one state and others.” Dengan ini, kebijakan luar negeri melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan di dalam suatu negara, ditujukan untuk negara lain. Sementara itu menurut Deborah Gerner, kebijakan luar negeri adalah

"the intentions, statements, and actions of an actor-oien, but not always, a state-directed towards the external world and the response of other actors to these intentions, statements and actions." Laura Neack (2008), mengkritik definisi Deborah yang ditekankan pada negara. Menurutnya aktor lain seperti, agama, pelaku bisnis, dan sejenisnya dalam sistem internasional, mampu merumuskan pedoman dan tujuan yang mengarah pada tindakan mereka terhadap aktor internasional lainnya. Masih banyak definisi tentang mengenai kebijakan luar negeri dari para akademisi, namun penulis menilai, kebijakan luar negeri tentu berkaitan dengan interaksi suatu negara yang didasari oleh motif dan tujuan tertentu.

1.7.1.2 Individu

Meski sempat tidak memperhatikan, kini, para akademisi menempatkan individu sebagai aktor penting dalam kebijakan luar negeri. Individu, menurut definisi Cambridge Dictionary, merupakan satu orang tunggal, bukan kelompok atau set. Individu digunakan sebagai sinonim untuk "orang." Contoh penggunaannya, "setiap individu memiliki hak yang tidak boleh dirampas."

1.7.1.3 Kepemimpinan

Menjelaskan kepemimpinan sama halnya dengan menjelaskan air kepada seseorang. Banyak orang tidak melakukannya karena semua tahu apa itu air dan apa itu kepemimpinan. Namun bagaimana pun, penjelasan dari beberapa ahli diperlukan untuk memahami lebih dalam apa itu kepemimpinan. Menurut Kkathy Mazzarelli, seorang CEO Graybar, kepemimpinan adalah 'tentang membantu

orang lain menyadari potensi mereka dan menginspirasi mereka.’ Sementara itu, menurut Paul Polman, CEO Unilever, kepemimpinan adalah ‘kombinasi dari legitimasi, kepribadian dan keterampilan manajemen yang membuat orang lain ingin mengikuti arahan seseorang.’ (Morgan, 2020).

Meski sering dikaitkan dengan jabatan seseorang, kepemimpinan, menurut Kruse, dalam artikel berjudul “What is Leadership” yang dimuat Forbes (2013), tidak ada kaitannya dengan jabatan, gelar, maupun atribut pribadi seseorang. Kaitannya dengan yang terakhir, saat mengatakan kata “pemimpin,” kebanyakan orang akan berpikir tentang individu karismatik yang mendominasi dan bertanggung jawab. Namun menurut Kruse (2013), pemimpin tidak membutuhkan sifat karismatik ekstrovert untuk mempraktikkan kepemimpinan. Dan mereka yang memiliki karisma tidak secara otomatis memimpin.

Definisi itu cukup bertentangan dengan definisi kepemimpinan politik yang dikemukakan oleh Wineroither (2013). Menurutnya, kepemimpinan politik, dalam definisi sempit, mengacu pada dampak pengambilan keputusan dan hasil politik yang dihasilkan dari tindakan pemegang jabatan politik. Dengan demikian, kepemimpinan politik berkaitan dengan gaya kepemimpinan dan dapat berakar pada ciri-ciri karakter tertentu dari kepribadian pemimpin.

1.7.2 Tipe Penelitian

Penelitian merupakan penelitian eksplanatif yang menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih dengan menguji hipotesis. Dengan begitu, peneliti akan menjelaskan bagaimana variabel tingkat individu, seperti persepsi, kognisi dan

motivasi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, berpengaruh dalam kebijakan luar negeri Turki. Kebijakan itu, terutama, kebijakan untuk memboikot produk Prancis usai “konfrontasinya” dengan presiden Emmanuel Macron, pada tahun 2020, yang membela kebebasan berekspresi majalah satire Prancis Charlie Hebdo dan menolak untuk memerintahkan penarikan karikatur satir Nabi.

1.7.3 Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Penelitian ini mengambil lingkup pemberitaan media online, artikel, buku, dokumen, buku serta cuitan Twitter Erdogan sebelum dan sesudah konfrontasinya dengan Prancis. Penelitian terdahulu dan terkini yang menjelaskan hubungan luar negeri Turki dengan Eropa dan dunia Arab serta analisis karakter kepemimpinan Erdogan dalam perumusan kebijakan akan sangat berarti bagi penelitian ini.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung (dari tangan pertama), baik itu pengumuman dan aksi public yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin, teks pidato, dan komentar informal dalam sebuah wawancara. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan peneliti-peneliti lain, atau data pihak ketiga yang disediakan untuk umum, seperti artikel jurnal, artikel dalam buku, artikel dalam jaringan, situs-situs berita dan laporan penelitian terkait.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Data kualitatif yang terkumpul baik itu data primer dan data sekunder, dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Dengan analisis ini, data yang diperoleh kemudian diterjemahkan untuk memperjelas fenomena apakah sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat atau tidak. Selain itu, analisis ini juga dapat memberikan gambaran baru sebagai penguat gambaran yang telah ada, namun tidak berdasarkan prediksi.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Penelitian terbagi menjadi lima BAB: BAB 1, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah yang dianalisis menggunakan kerangka teori untuk menjawab hipotesis; BAB 2 memberikan gambaran dinamika hubungan luar negeri Turki dengan Uni Eropa dan dunia Arab. BAB 3, menguji hipotesis satu. BAB 4, menguji hipotesis dua; dan BAB 5, berisi kesimpulan yang membuktikan hipotesis.